



Human Capital, Kebijakan Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Analisis Evidence di Indonesia

Hanifah¹, Yulhendri²

^{1,2} Universitas Negeri Padang

*Corresponden Author, hanifah21051999@gmail.com

Abstract : *Economic growth is a macroeconomic problem in the long term in order to achieve prosperity. Economic growth is used as an indicator to determine the level of success of a country/region. One of the important factors that can affect economic growth is human capital. Several aspects contained in human capital include aspects of education, training, experience, skills and entrepreneurship and networking. The higher the quality of human capital with skills and knowledge, the more productive an individual will be to understand, apply and get results from advances in information technology. In the end, it will improve the nation's economic and living standards in a more advanced direction. In addition to human capital, economic growth is also influenced by the government. Government investment in physical capital and human capital will determine long-term economic growth. The government through fiscal policy has a very large role in spurring economic growth to achieve advanced economic growth, controlling and controlling inflation. This study uses data from 2005-2020 in 26 provinces in Indonesia. This research will provide an overview of human capital, education policy and economic growth, especially in Indonesia.*

Keywords : *human capital, pertumbuhan ekonomi, kebijakan pendidikan*



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2018 by author.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah makro ekonomi dalam jangka panjang guna mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan suatu negara/ daerah. Dalam analisis makro pertumbuhan ekonomi dapat diukur melalui pendapatan perkapita nasional riil yang dicapai oleh suatu negara. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi secara eksplisit pada tahun tertentu, artinya terjadi peningkatan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan pada tahun tersebut.

Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) tanpa melihat kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa melihat apakah ada perubahan dalam struktur ekonominya (Suryana, 2005). Nilai PDB sangat berguna untuk melihat perkembangan ekonomi suatu negara dengan cara

membandingkannya dengan nilai PDB negara lain. Nilai PDB yang tinggi menandakan perekonomian yang ada di negara tersebut baik, sedangkan nilai PDB yang rendah menandakan perekonomian negara tersebut mengalami kemunduran. Dalam konsep dasar ekonomi makro, indikator yang dapat digunakan dalam mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domesti Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk tingkat provinsi. Berdasarkan data dari *World Bank*, pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2005-2020 mengalami fluktuasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,34%, dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar -2,2%. Peristiwa ini terjadi dikarenakan pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi penularan virus dengan menerapkan *social distancing* dan *lockdown* yang mempengaruhi seluruh kegiatan masyarakat.

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal manusia (Riley, 2012; Lucas, 1988; Mankiw et al., 1992; De la Fuente dan Doménech, 2000, 2006; serta Whalley & Zhou, 2013). Menurut Mincer (1996) adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan *human capital* akan berperan penting dalam membentuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jika suatu negara memiliki sumber daya alam yang terbatas, namun jika mempunyai modal manusia (*human capital*) yang berkualitas dan terampil maka negara tersebut dapat memanfaatkan modal fisik dan sumber daya alamnya secara efisien seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura. Oleh karena itu penting bagi suatu negara meningkatkan kualitas *human capital* untuk kepentingan pembangunan.

Human capital sebagai sumber daya manusia menekankan pada pentingnya kualitas, disamping kuantitas. Menurut Wadji & Isa (2013) ada beberapa aspek yang terdapat dalam *human capital* diantaranya aspek pendidikan, pelatihan, pengalaman, keterampilan dan kewirausahaan serta jaringan. Dalam penelitian ini yang akan dibahas yaitu mengenai aspek pendidikan yang selanjutnya disebut sebagai *human capital high level* dan aspek kewirausahaan yang selanjutnya akan disebut sebagai *human capital entrepreneur*.

Berdasarkan data yang dirilis oleh *world bank* HCI Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan sebesar 0,01 poin yaitu 0,54 poin dibandingkan pada tahun 2018 sebesar 0,53 poin. HCI (*human capital index*) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas *human capital* yang dimiliki suatu negara. Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas *human capital* dapat dilakukan melalui pendidikan. Seseorang dengan pendidikan yang lebih tinggi atau *human capital level* tinggi akan mendorong seseorang untuk memiliki produktivitas yang tinggi pula. Proses pendidikan merupakan bekal yang diberikan kepada manusia untuk lebih ahli, lebih cermat dan lebih teliti sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan dan lapangan perekonomian lainnya. Sedangkan dalam perekonomian semakin tinggi pendidikan atau akumulasi modal manusia maka *human capital* atau modal manusia yang dimiliki akan semakin berkualitas sehingga *output* nasional akan semakin tinggi serta akan semakin mapan suatu negara dalam mencapai tingkat pertumbuhannya (Yulhendri, 2013).

Menurut Sadariawati (2010) orang yang memiliki pendidikan lebih tinggi yaitu orang yang memiliki tingkat pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas atau lebih tinggi. Pekerja dengan tamatan sekolah menengah ke atas digunakan sebagai proksi untuk *human capital high level*.

Hal ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh dan Fleisher & Zhou (2010), Adawo (2011) dan Volchik,dkk (2018).

Berdasarkan data dari BPS, jumlah pekerja dengan tamatan sekolah menengah ke atas cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan oleh jumlah penduduk Indonesia yang juga meningkat. Jumlah pekerja terbanyak merupakan lulusan SMA sederajat diikuti oleh lulusan Universitas. Sedangkan jumlah pekerja paling sedikit merupakan lulusan diploma / akademi.

Menurut (Mincer, 1984) pekerja yang berpendidikan tinggi akan memiliki tingkat upah yang tinggi dan meningkatkan pendapatan individu sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Schuerenberg-Frosch, (2015);Volchik, Oganeshyan, & Olejarz (2018);Han & Lee, (2020), dimana hasil penelitiannya menunjukkan pekerja yang memiliki tingkat pendidikan tinggi berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pendapatan sehingga memacu pertumbuhan ekonomi.

Aspek *human capital* selanjutnya ialah kewirausahaan, yang selanjutnya disebut sebagai *human capital entrepreneur*. Beberapa penelitian mengenai teori *human capital* berkembang ke arah *entrepreneur* (Chandler dan hanks, 1988: Davisson dan Honig, 2003, Rauch, 2005 : Meutia, 2012). Dalam arti makroekonomi yang lebih luas kualitas *human capital* akan mendorong inovasi dan *entrepreneur* yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Dakhali dan Clercq, 2004). *Entrepreneur* berperan penting dan memiliki dampak langsung bagi suatu negara baik negara berkembang maupun negara maju (Munizu, 2010 dalamWadji & Isa, 2013).

Dengan adanya *entrepreneur* yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tinggi atau *human capital entrepreneur* akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun berdasarkan realita dilapangan banyak orang yang berminat untuk menjadi seorang *entrepreneur*, namun pengetahuan yang dimiliki masih sedikit dan takut gagal untuk sehingga lebih banyak orang yang berminat untuk bekerja kantoran dari pada menjadi *entrepreneur*.

Faktor lainnya yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah pemerintah. Dalam teori endogen pemerintah memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dapat diketahui melalui pengeluaran atau konsumsi untuk publik dan penerimaan pajak.

Pengeluaran pemerintah digambarkan melalui APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. UUD 1945 Pasal 31 ayat (4) menginstruksikan alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20% melalui APBN ataupun APBD. Dalam penelitian ini anggaran pendidikan di hitung menggunakan variabel *dummy*, dimana pemerintah mulai dari tahun 2009 telah menerapkan kebijakan anggaran 20% untuk pendidikan sehingga diberi skala 1, sedangkan untuk tahun sebelum 2009 diberi skala 0. Variabel *dummy* yaitu variabel yang dipakai dalam mengkategorikan data yang bersifat kualitatif dalam bentuk skala nominal seperti 0 dan 1.

Semakin produktif pengeluaran pemerintah di suatu negara maka akan mempengaruhi perekonomiannya ke arah yang lebih baik (Lubis (2014). Jika pemerintah mengeluarkan pengeluaran yang terlalu sedikit maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah yang seimbang dapat memajukan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anitasari & Soleh (2015) dan Lubis (2014) yang menunjukkan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sejalan dengan penelitian Quiggin (1999) dan Feehan & Matsumoto (2002) yang menyatakan pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur publik dan pembentukan sumber daya manusia berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi.

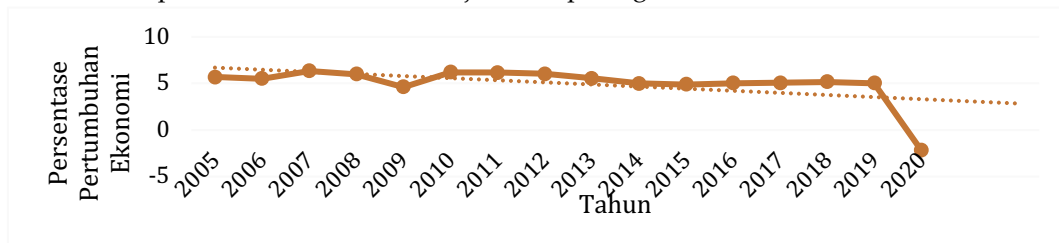
METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis yang mendeskripsikan atau menggambarkan sekumpulan secara visual baik dalam bentuk tulisan maupun gambar/grafik mengenai pengaruh atau hubungan antara variabel bebas yaitu *human capital* level tinggi, *human capital* (khusus *entrepreneur*) dan kebijakan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sugiyono, 2013). Data pada penelitian ini bersumber dari data sekunder, data didapat dari publikasi Badan Pusat Statistik yang merupakan gabungan dari data deret waktu (*time series*) selama enam belas tahun dari tahun 2005 - 2020 dan data deret lintang (*cross section*) dari 26 provinsi di Indonesia yang menghasilkan 416 observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil output barang dan jasa yang diproduksi dalam kurun waktu tertentu untuk mencapai kesejahteraan. Pertumbuhan ekonomi diukur melalui besarnya produk domestik bruto (pdb) untuk nasional dan produk domestik regional bruto (pdrb) untuk daerah. Trend laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam periode 2005-2020 akan dijelaskan pada gambar dibawah ini



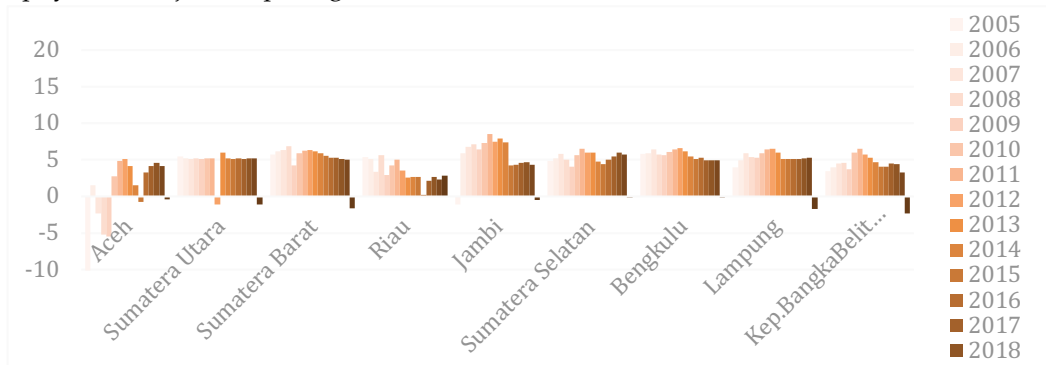
Gambar 1. Trend Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Sumber: BPS 2021, data diolah.

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Indonesia berfluktuatif dan menunjukkan tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2005-2020 mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,34 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia berada diatas 5 persen kecuali pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4.63 persen dan tahun 2015 tumbuh sebesar 4.88 persen. Pertumbuhan ekonomi terjadi pada tahun 2020 sebesar -2,2 persen.

Penurunan ini terjadi di seluruh wilayah Indoensia, hal ini dikarenakan pengaruh wabah Covid-19 yang melanda dari bulan Maret 2019 diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi penularan wabah dengan diterapkannya *social distancing* dan *lockdown* yang sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi di Indonesia dalam periode 2005-2020. Agar penjelasan lebih rinci maka akan dibagi menjadi tiga wilayah. Wiayah

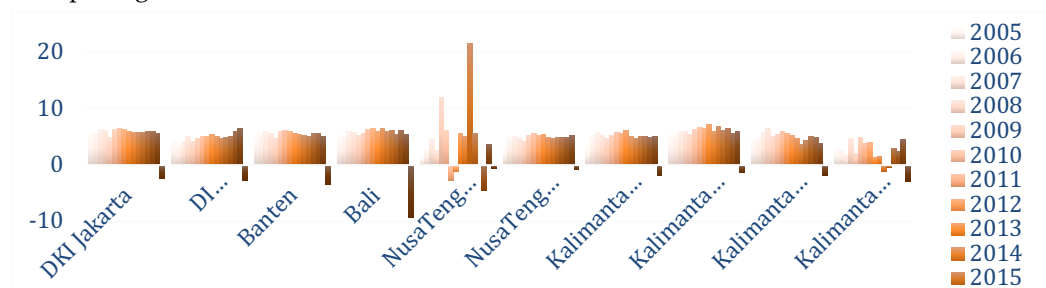
pertama adalah Sumatera yang meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sumatera tahun 2005-2020

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

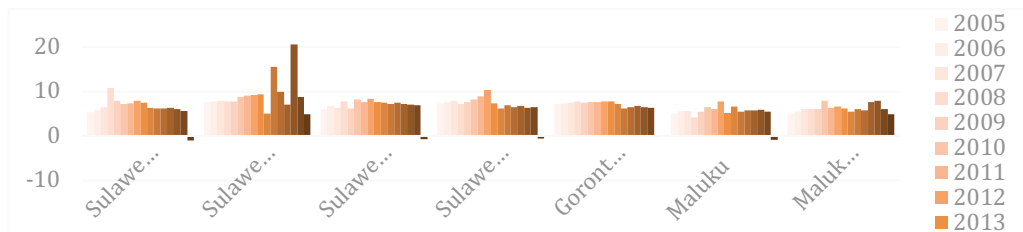
Berdasarkan gambar 2 laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sumatera pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga negatif kecuali pada provinsi Riau yang tetap positif. Pada kurun waktu tersebut, laju pertumbuhan ekonomi Aceh dapat dikatakan tidak stabil karena berfluktuatif secara ekstrem. Sedangkan untuk provinsi lainnya seperti Sumatera Barat, Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan tumbuh stabil kecuali pada tahun 2020. Wilayah kedua adalah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan yang meliputi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada gambar berikut



Gambar 3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Jawa, Bali dan Kalimantan tahun 2005 -2020

Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Pada wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan pertumbuhan ekonomi masing-masing provinsi pada tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga minus pada tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi provinsi Nusa Tenggara Barat tergolong tidak stabil karena mengalami fluktuasi yang paling ekstrem diikuti oleh provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan untuk provinsi lainnya laju pertumbuhan ekonomi cenderung stabil kecuali pada tahun 2020. Wilayah ketiga adalah Sulawesi, Maluku dan Papua yang meliputi provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua tahun 2005-2020

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan ekonomi pada wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga minus kecuali untuk provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara. Provinsi Sulawesi Tengah memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang kurang stabil dibandingkan dengan provinsi lainnya. Sementara provinsi Maluku Utara tumbuh dengan sangat stabil.

Selanjutnya karakteristik variabel pertumbuhan ekonomi masing-masing wilayah yang diukur menggunakan nilai maksimum, nilai minimum dan rata-rata akan dijelaskan pada tabel (1) dibawah ini

Tabel 1. Karakteristik Variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia (persen)

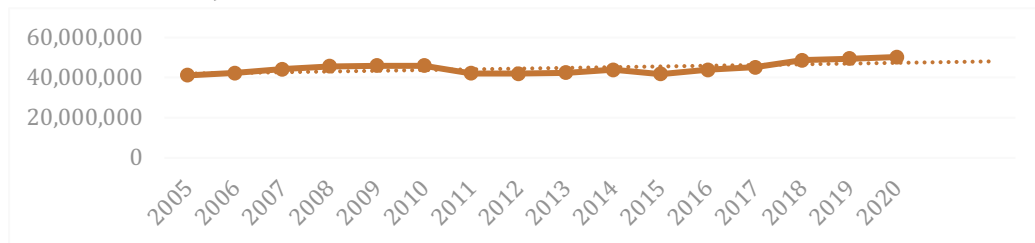
Provinsi	t	Rata-rata	Minimum	Maksimum
Aceh	16	0.74	-10.12	5.14
Sumatera Utara	16	4.46	-1.07	6.01
Sumatera Barat	16	5.29	-1.60	6.88
Riau	16	3.35	0.22	5.65
Jambi	16	5.34	-1.12	8.54
Sumatera Selatan	16	5.03	-0.11	6.50
Bengkulu	16	5.36	-0.02	6.60
Lampung	16	4.98	-1.67	6.53
Kep. Bangka Belitung	16	4.16	-2.30	6.50
DKI Jakarta	16	5.56	-2.36	6.73
DI Yogyakarta	16	4.59	-2.69	6.59
Banten	16	5.13	-3.38	6.38
Bali	16	5.02	-9.31	6.73
Nusa Tenggara Barat	16	4.01	-4.50	21.76
Nusa Tenggara Timur	16	4.65	-0.83	5.62
Kalimantan Barat	16	4.82	-1.82	6.08
Kalimantan Tengah	16	5.84	-1.40	7.37
Kalimantan Selatan	16	4.76	-1.81	6.45
Kalimantan Timur	16	2.35	-2.85	5.10
Sulawesi Utara	16	6.35	-0.99	10.86
Sulawesi Tengah	16	9.20	4.86	8.74
Sulawesi Selatan	16	6.72	-0.70	8.39
Sulawesi Tenggara	16	6.96	-0.65	10.41
Gorontalo	16	6.73	-0.02	7.76
Maluku	16	5.34	-0.92	7.81
Maluku Utara	16	6.23	4.92	7.95
Total		133.0	-10.1	21.8

Sumber: BPS 2021, diolah

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa dalam periode 16 tahun rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 9.20% persen. Laju pertumbuhan ekonomi minimum terletak pada Provinsi Aceh tahun 2005 sebesar -10.1 persen dan laju pertumbuhan ekonomi maksimum berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 sebesar 21.8 persen dari 26 provinsi di Indonesia rata-rata laju pertumbuhan ekonomi sebesar 133.0 persen, laju pertumbuhan ekonomi minimum sebesar -10.1 persen dan laju pertumbuhan ekonomi maksimum sebesar 21.8 persen.

b. Human Capital Level Tinggi

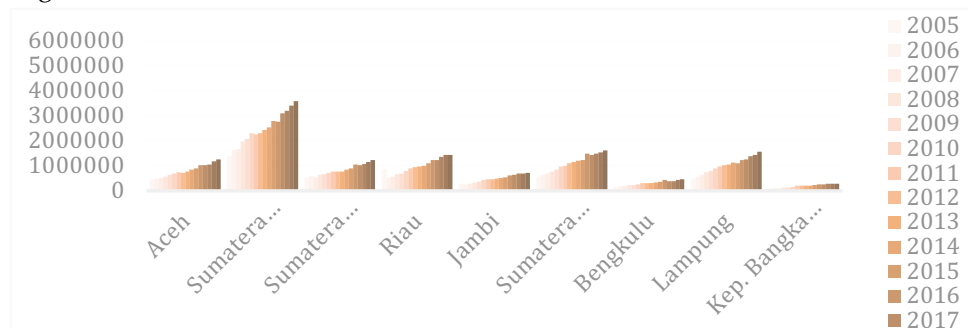
Teori *human capital* menyatakan bahwa antara pendidikan dan *human capital* saling berhubungan. Proses pendidikan merupakan bekal yang diberikan kepada manusia untuk lebih ahli, lebih cermat dan lebih teliti sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja di perusahaan dan lapangan perekonomian lainnya. Sedangkan dalam perekonomian semakin tinggi pendidikan atau akumulasi modal manusia maka *human capital* atau modal manusia yang dimiliki akan semakin berkualitas / berlevel tinggi sehingga output nasional akan semakin tinggi serta akan semakin mapan suatu negara dalam mencapai tingkat pertumbuhannya Yulhendri (2013). *Trend human capital level tinggi di Indonesia* dapat dilihat pada gambar grafik berikut



Gambar 5. Tren Pertumbuhan Human Capital di Indonesia

Sumber BPS 2021, data diolah

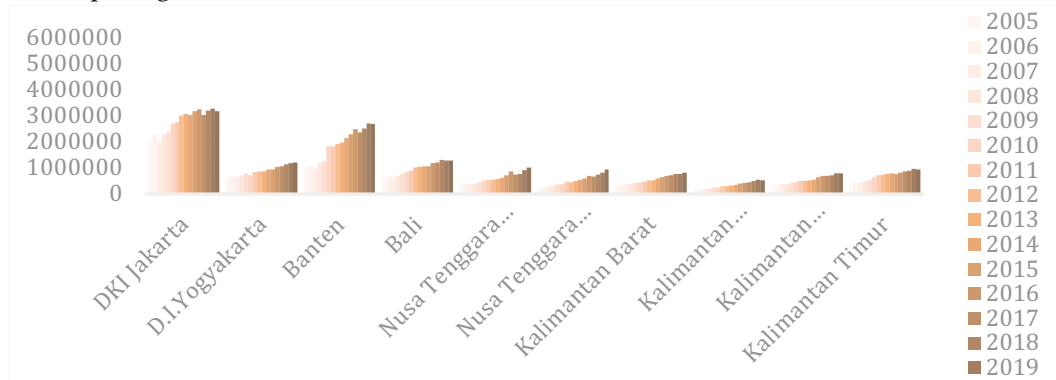
Berdasarkan gambar 5 dapat diketahui jumlah *human capital* level tinggi mengalami fluktuasi dan menunjukkan tren yang meningkat. *Human capital* terendah terjadi pada tahun 2011 dan tertinggi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di Indonesia yang semakin meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan *human capital* level pada masing-masing provinsi dalam periode 2005-2020. Agar penjelasan lebih rinci, maka akan dibagi dalam tiga wilayah. Wilayah pertama adalah Sumatera yang meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 6. Human Capital level tinggi Wilayah Sumatera tahun 2005-2020

Sumber: BPS, 2021 (data diolah)

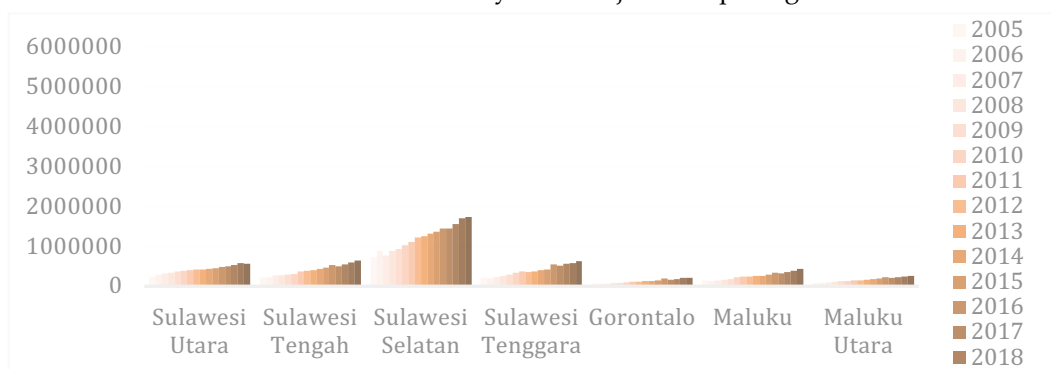
Human capital level tinggi pada wilayah Sumatera cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada gambar 6 diatas terlihat bahwa Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki *human capital* tinggi yang banyak dibandingkan wilayah lainnya. Sedangkan *human capital* level tinggi paling sedikit berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Utara merupakan yang terbanyak di Sumatera sedangkan Kepulauan Bangka Belitung jumlah penduduknya paling sedikit. Wilayah kedua adalah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan yang meliputi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 7. Human Capital level Tinggi Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan tahun 2005-2020

Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar 7. dapat diketahui bahwa *human capital* level tinggi terbanyak berada di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disebabkan oleh jumlah penduduk DKI Jakarta lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan *human capital* level tinggi yang paling sedikit berada di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya wilayah tiga terdiri dari Sulawesi dan Maluku yang meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 8. Human Capital level Tinggi wilayah Sulawesi dan Maluku tahun 2005-2020

Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Human capital level tinggi terbanyak berada di wilayah Sulawesi Selatan berdasarkan gambar 8, sedangkan *human capital* level tinggi berada di wilayah Gorontalo. Hal ini dikarenakan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan daerah lainnya, sedangkan Gorontalo memiliki penduduk paling sedikit.

Selanjutnya akan dijelaskan data karakteristik variabel *human capital level tinggi* provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2020 pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Karakteristik Variabel Human Capital Level Tinggi (orang)

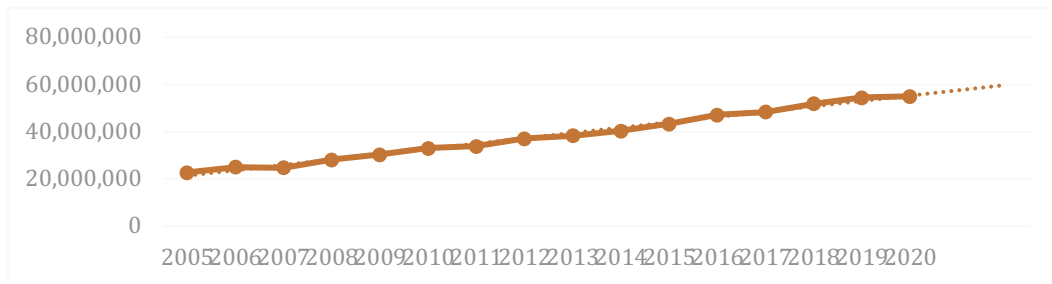
Provinsi	t	Rata-rata	Minimum	Maksimum
Aceh	16	808.955	502.047	1.389.516
Sumatera Utara	16	2.471.585	1389.516	3.590.881
Sumatera Barat	16	833.149	550.168	1.241.179
Riau	16	988.626	546.896	1.435.592
Jambi	16	487.037	249.514	712.488
Sumatera Selatan	16	1.108.188	556.400	1.632.015
Bengkulu	16	311.324	169.445	456.039
Lampung	16	1.017.842	480.636	1.565.109
Kep.BangkaBelitung	16	197.232	104.308	288.625
DKI Jakarta	16	2.791.955	1.996.588	3.277.052
DI Yogyakarta	16	891.002	605.456	1.217.474
Banten	16	1.891.054	955.963	2.700.985
Bali	16	974.168	600.433	1.305.234
NusaTenggaraBarat	16	616.815	342.482	1.009.402
NusaTenggaraTimur	16	520.013	209.864	954.436
KalimantanBarat	16	554.673	307.754	819.500
KalimantanTengah	16	340.389	154.379	548.751
KalimantanSelatan	16	546.211	317.697	789.709
KalimantanTimur	16	703.717	404.271	960.337
SulawesiUtara	16	423.231	251.221	575.050
SulawesiTengah	16	405.942	220.387	638.029
SulawesiSelatan	16	1.214.795	730.526	1.743.090
SulawesiTenggara	16	394.371	192.720	632.403
Gorontalo	16	129.966	59.160	211.412
Maluku	16	258.551	136.098	437.202
Maluku Utara	16	166.026	75.683	258.892
Total		21.046.818	59.160	3.590.881

Sumber: BPS 2021, data diolah

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa dalam periode rata-rata 16 tahun rata-rata *human capital level tinggi* tertinggi terletak pada provinsi DKI Jakarta sebesar 2.791.955 orang. *Human capital level tinggi* minimum berada pada provinsi Gorontalo tahun 2005 sebesar 59.160 orang dan *human capital level tinggi* maksimum terletak pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2020 sebesar 3.590.881 orang. Pada 26 provinsi di Indonesia rata-rata *human capital level tinggi* sebesar 21.046.818 orang, *human capital level tinggi* minimum sebesar 59.160 orang dan *human capital level tinggi* maksimum sebesar 3.590.881 orang.

c. *Human Capital (khusus Entrepreneur)*

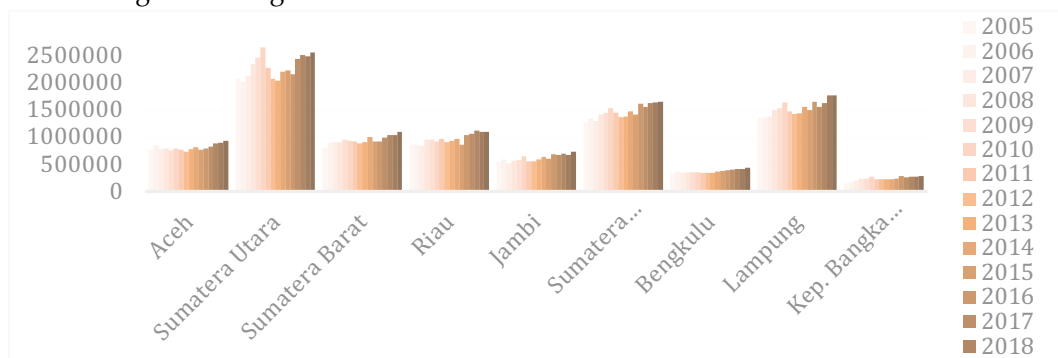
Human Capital Entrepreneur merupakan keterampilan dan pengetahuan khusus kewirausahaan tingkat tinggi, seperti dalam menjual, bernegosiasi, pengembangan produk, penilaian risiko dan modal sosial kewirausahaan. Untuk mengetahui jumlah *entrepreneur* yang dimiliki dapat diketahui melalui jumlah pekerja berdasarkan status pekerjaan yang termasuk kedalam pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap dan berusaha dibantu buruh tetap. Jumlah *entrepreneur* di Indonesia akan dijelaskan pada gambar grafik berikut ini.



Gambar 9. Tren Pertumbuh Human Capital (khusus Entrepreneur di Indonesia)

Sumber: BPS 2021, data diolah

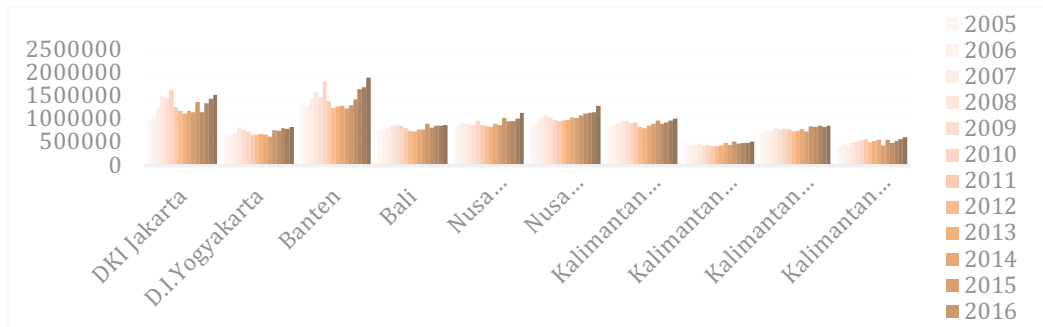
Berdasarkan gambar 9 dapat diketahui tren pertumbuhan *human capital* khusus *entrepreneur* di Indonesia mengalami peningkatan. *Human capital* khusus *entrepreneur* di Indonesia berfluktuatif dengan jumlah *human capital* khusus *entrepreneur* paling sedikit terjadi pada tahun 2005 dan tertinggi pada tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Selanjutnya akan dijelaskan data *human capital* level pada masing-masing provinsi dalam periode 2005-2020. Agar penjelasan lebih rinci, maka akan dibagi dalam tiga wilayah. Wilayah pertama adalah Sumatera yang meliputi provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung dan Kepulauan Bangka Belitung.



Gambar 10. Human Capital level tinggi Wilayah Sumatera tahun 2005-2020

Sumber: BPS 2021(data diolah)

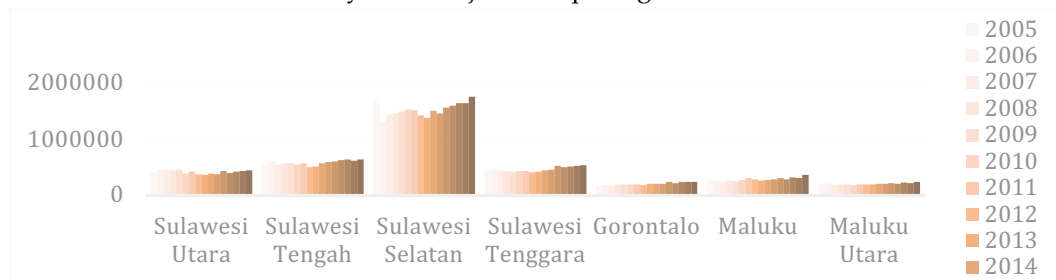
Human capital khusus *entrepreneur* pada wilayah Sumatera cenderung mengalami fluktuasi. Pada gambar 10 diatas terlihat bahwa Sumatera Utara merupakan daerah yang memiliki *human capital entrepreneur* yang banyak dibandingkan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh Sumatera Utara memiliki jumlah penduduk lebih banyak dibandingkan provinsi lainnya. Sedangkan *human capital* khusus *entrepreneur* paling sedikit berada di wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Wilayah kedua adalah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan yang meliputi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan pada gambar berikut.



Gambar 11. Human Capital level Tinggi Wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan tahun 2005-2020

Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar 11 dapat diketahui bahwa *human capital* khusus *entrepreneur* wilayah dua mengalami fluktuasi. *Human capital entrepreneur* tertinggi berada di wilayah Banten. Sedangkan *human capital* khusus *entrepreneur* yang paling sedikit berada di wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya wilayah tiga terdiri dari Sulawesi, Maluku dan Papua yang meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara. Untuk lebih rincinya akan dijelaskan pada gambar berikut ini.



Gambar 12. Human Capital level Tinggi wilayah Sulawesi dan Maluku

Sumber: BPS 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar 12 *human capital* khusus *entrepreneur* pada wilayah tiga mengalami fluktuasi. *Human capital* khusus *entrepreneur* terbanyak berada di wilayah Sulawesi Selatan, sedangkan *human capital* level tinggi berada di wilayah Gorontalo. Hal ini dikarenakan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dibandingkan daerah lainnya, sedangkan Gorontalo memiliki penduduk paling sedikit. Selanjutnya akan dijelaskan data karakteristik variabel *human capital* khusus *entrepreneur* provinsi-provinsi di Indonesia pada tahun 2005-2020 pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Karakteristik Variabel Human Capital (khusus Entrepreneur)

Provinsi	t	Rata-rata	Minimum	Maksimum
Aceh	16	812.987	739.389	2.081.815
Sumatera Utara	16	2.299.835	2.030.807	2.662.073
Sumatera Barat	16	948.420	805.539	1.096.508
Riau	16	970.321	845.692	1.125.908
Jambi	16	619.845	522.658	730.667
Sumatera Selatan	16	1.474.062	1.267.679	1.662.325
Bengkulu	16	374.013	334.569	442.771
Lampung	16	1.541.380	1.359.288	1.781.688
Kep.BangkaBelitung	16	236.119	158.079	281.560
DKI Jakarta	16	1.292.645	1.010.646	1.635.369
DI Yogyakarta	16	730.154	625.124	840.307
Banten	16	1.467.535	1.244.765	1.907.247
Bali	16	824.089	746.376	907.488
NusaTenggaraBarat	16	931.883	834.907	1.137.197
NusaTenggaraTimur	16	1.053.836	925.683	1.300.522
KalimantanBarat	16	918.917	814.735	1.024.901
KalimantanTengah	16	467.637	415.965	524.005
KalimantanSelatan	16	790.789	697.871	864.470
KalimantanTimur	16	517.597	412.600	613.197
SulawesiUtara	16	422.017	365.611	464.822
SulawesiTengah	16	584.460	508.624	647.231
SulawesiSelatan	16	1.535.410	1.308.022	1.761.912
SulawesiTenggara	16	467.509	413.577	546.744
Gorontalo	16	211.135	178.730	249.399
Maluku	16	290.676	252.108	373.645
Maluku Utara	16	210.539	185.113	248.018
Total		21.993.811	158.079	2.662.073

Sumber: BPS 2021, data diolah

Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui bahwa dalam periode rata-rata 16 tahun rata-rata *human capital* (khusus *entrepreneur*) tertinggi terletak pada provinsi Sumatera Utara sebesar 2.299.835 orang. *Human capital* (khusus *entrepreneur*) minimum berada pada provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2005 sebesar 158.079 orang dan *human capital* (khusus *entrepreneur*) maksimum terletak pada Provinsi Sumatera Utara tahun 2010 sebesar 2.662.073 orang. Pada 26 provinsi di Indonesia rata-rata *human capital* (khusus *entrepreneur*) sebesar 21.993.811 orang, *human capital* (khusus *entrepreneur*) minimum sebesar 158.079 orang dan *human capital* (khusus *entrepreneur*) maksimum sebesar 2.662.073 orang.

d. Kebijakan Pendidikan

Teori endogen menekankan pentingnya peran pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi pemerintah dalam modal fisik dan *human capital* akan menetapkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah melalui kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat besar untuk memacu pembangunan ekonomi guna meraih pertumbuhan ekonomi yang maju, memberantas pengangguran serta mengendalikan inflasi. Kontribusi pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui pengeluaran atau konsumsi untuk publik dan penerimaan pajak. Salah satu bentuk pengeluaran pemerintah yang produktif ialah pengeluaran untuk sektor pendidikan.

Pengeluaran pemerintah merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah. Di Indonesia sejak tahun 2009 pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total APBN / APBD. Kebijakan pendidikan dalam pada penelitian ini dihitung menggunakan variabel *dummy*. Variabel *dummy* yaitu variabel yang dipakai dalam mengkategorikan data yang bersifat kualitatif dalam bentuk skala nominal seperti 0 dan 1. Dalam penelitian ini anggaran pendidikan sebelum tahun 2009 diberi skala nominal 0 sedangkan anggaran pendidikan setelah tahun 2009 diberi skala 1. Kebijakan pendidikan yang diukur menggunakan variabel *dummy* memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,75 dengan nilai minimum 0 untuk tahun 2009 kebawah atau sebelum diterapkannya kebijakan anggaran 20%. sedangkan nilai maksimum 1 untuk tahun 2009 ke atas atau setelah diterapkannya kebijakan anggaran 20%.

SIMPULAN

Berdasarkan pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ialah berfluktuatif dan menunjukkan tren yang menurun. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2007 dan terendah terjadi pada tahun 2020 hingga -2,2 persen yang diakibatkan oleh pengaruh wabah Covid-19 yang melanda dari bulan Maret 2020 diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Dalam periode 16 tahun rata-rata laju pertumbuhan ekonomi tertinggi berada pada provinsi Sulawesi Tengah. Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi terendah adalah provinsi Aceh dan tertinggi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Jumlah *human capital* level tinggi mengalami fluktuasi dan menunjukkan tren yang meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. *Human capital* terendah terjadi pada tahun 2011 dan tertinggi pada tahun 2020. Dalam periode rata-rata 16 tahun rata-rata *human capital* level tinggi tertinggi terletak pada provinsi DKI Jakarta. *Human capital* level tinggi terendah adalah Gorontalo dan tertinggi adalah Sumatera Utara. Pertumbuhan *human capital* khusus *entrepreneur* di Indonesia menunjukkan tren meningkat dengan jumlah *human capital* khusus *entrepreneur* paling sedikit terjadi pada tahun 2005 dan tertinggi pada tahun 2020. Dalam periode rata-rata 16 tahun rata-rata *human capital* (khusus *entrepreneur*) tertinggi terletak pada Provinsi Sumatera Utara. *Human capital* (khusus *entrepreneur*) terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung dan tertinggi adalah Sumatera Utara.

Pengeluaran pemerintah merupakan gambaran dari kebijakan pemerintah. Di Indonesia sejak tahun 2009 pemerintah telah menerapkan kebijakan untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebanyak 20% dari total APBN / APBD. Semakin tinggi pengeluaran pemerintah terhadap pendidikan maka akan meningkatkan kualitas *human capital* dengan cara memberikan sekolah gratis tanpa biaya apapun dan merata keseluruh wilayah Indonesia. Sehingga dengan semakin banyaknya jumlah pekerja yang menamatkan pendidikan minimal sekolah menengah atas akan meningkatkan produktifitas sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Adawo, M. A. (2011). Has education (human capital) contributed to the economic growth of Nigeria? In *Journal of economics and international finance*. Citeseer.

452-464.

Whalley, J., & Zhao, X. (2013). The contribution of human capital to China's economic growth.
China Economic Policy Review.

<https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S1793969013500015>

Yulhendri. (2013). *Pembangunan Human and Social Capital.pdf.*